



Analisis Program Magang Jepang Dalam Penciptaan Lapangan Kerja Baru (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)

Analysis of the Japanese Internship Programme in the Creation of New Jobs (Study at the East Java Provincial Labour and Migration Office)

Nur Laily Azizah

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: nurlailyazizah07.nla@gmail.com

Ach. Zainal Anshari

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: zaenansori3@gmail.com

Abstract:

Qualitative research which aims to answer questions about how the Japanese internship program is implemented at the East Java Province Manpower and Transmigration Service and how effective the Japanese internship program is in creating new jobs. The research method used is a descriptive qualitative approach with a type of research study on objects. Data collection was carried out by interviews with informants in this research, namely the head of the management development section of the East Java Provincial Manpower and Transmigration Service, the selection committee for the Japanese internship program, Japanese post-internships. The results of this research conclude that the implementation of the Japanese internship program can be said to be effective because it is in accordance with existing regulations but there are few obstacles when conducting outreach to each district or city with regional autonomy. Regarding the effectiveness of the Japanese internship program in creating new jobs when they return to Indonesia, based on research results, Japanese internship activities can have a positive impact, namely being able to create independent entrepreneurs in both business and service sectors and having employees, and providing more effective work opportunities by utilizing certificates to apply for jobs in Indonesia, both private and public.

Keywords: Japanese Internship Program, Job creation.

Abstrak:

Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi program magang Jepang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan bagaimana efektivitas program magang Jepang dalam penciptaan lapangan kerja baru. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi pada objek. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu kepala seksi pembinaan penyelenggaraan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, panitia seleksi program magang Jepang, Purna magang Jepang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi program magang Jepang dapat dikatakan efektif karena sudah sesuai dengan peraturan yang ada namun sedikit memiliki kendala saat melakukan sosialisasi ke setiap daerah kabupaten atau kota adanya otonomi daerah. Mengenai efektivitas program magang Jepang dalam penciptaan lapangan kerja baru ketika mereka kembali ke Indonesia, berdasarkan hasil riset kegiatan magang Jepang dapat memberikan dampak positif yaitu mampu menciptakan wirausaha mandiri baik dalam bidang usaha maupun jasa serta memiliki karyawan, dan memberikan peluang kerja lebih efektif dengan memanfaatkan sertifikat untuk melamar pekerjaan di Indonesia baik swasta maupun negeri.

Kata Kunci: Program Magang Jepang, Penciptaan lapangan kerja.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman terjadi perubahan transformasi dan disrupsi oleh Revolusi industri 4.0 yang mampu mendorong dalam hal produktivitas dan berfikir tentang pertumbuhan suatu Negara berfikir dalam jangka panjang. Dalam hal ini suatu Negara sebagai roda dalam menjalankan perekonomian harus mampu beradaptasi demi keberhasilan dalam ekonomi. Menurut Kanselir Jerman, Angela Merkel berpendapat mengenai Revolusi Industri 4.0 merupakan perubahan menyeluruh dalam semua aspek pada produksi di dunia industri dengan melakukan gabungan antara internet dan teknologi digital kolaborasi dengan industri konvensional.¹

Sejak adanya bonus demografi di Indonesia, pemerintah mengalami kecemasan mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 sebesar 5,2%, Selain itu semakin banyaknya angka pengangguran di Indonesia tahun 2019 sebesar 7,05%.² Mengingat pembentukan soft skill sumber daya manusia terus menerus ditekankan untuk dapat bersaing dalam dunia kerja karena lapangan kerja yang tersedia belum cukup diserap oleh tenaga kerja yang ada, sehingga pemerintah perlu membuat inovasi yang selaras dengan kemampuan dan potensi masyarakat untuk dikembangkan.

Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yang cenderung stagnan membuat pemerintah sebagai lembaga yang menjalankan roda perekonomian harus berfikir serta membuat rencana untuk mendukung segala hal yang berkaitan dengan produktivitas. Hal terpenting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi terdapat empat strategi utama yakni daya saing dalam bidang ekonomi, kapasitas dan pengelolaan dalam bidang industri, ekonomi digital, dan runtutan struktur serta estimasi segala sumber pembiayaan. Pemerintah berupaya mengembangkan dan memajukan ekonomi daerah dengan cara pemberdayaan sumber daya manusia agar mampu bersaing dan mengelola segala potensi yang ada di daerah.³

Para Tenaga kerja mencari pekerjaan dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas membuat pemerintah Negara Indonesia melakukan penanganan khusus dengan cara menyelenggarakan program magang ke Jepang yang diadakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang menjalin kerja sama dengan pemerintah Jepang dan tertulis dalam perjanjian yang mencakup persiapan, rekrutmen, seleksi, pelatihan sebelum pemberangkatan ketika di Indonesia, pelatihan ketika di Jepang, pembiayaan dan pasca magang, peserta dengan penyelenggara terikat kontrak perjanjian magang.⁴

Dalam melakukan pembangunan ekonomi di setiap daerah pemerintah berupaya dalam meningkatkan peluang kerja untuk masyarakat daerah, pemerintah daerah mempunyai inisiatif bersama masyarakat dalam merancang dan membangun perekonomian dengan cara menggali potensi keahlian sumber daya manusia yang

¹ Hoedi Prasetyo and Wahyudi Sutopo, "Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset," *J@ti Undip : Jurnal Teknik Industri* 13, no. 1 (2018): 17.

² BPS, "Agustus 2019: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 5,28 Persen," *Badan Pusat Statistik*, last modified 2019, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2019/11/05/1565/agustus-2019-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-28-persen.html>.

³ /BPS-Statistics Indonesia, "Indonesia 2019 Outlook," *Laporan Perekonomian Indonesia 2019* 04, no. 01 (2019): 2019–2020.

⁴ Andari Yurikosari, "Review Pemagangan Luar Negeri Dalam Rangka Penempatan (Studi Mengenai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2008)," *Jurnal Hukum PRIORIS* 5, no. 1 (2016): 45–62.

ada di daerahnya, serta mengajak masyarakat untuk melakukan pembangunan ekonomi.⁵

Pada tanggal 16 September 1993 melalui penandatanganan kerjasama antara Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Depnakertrans) saat ini berganti menjadi Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dengan asosiasi pemerintah Jepang, Pada tahun 2002 Kementerian ketenagakerjaan menyelenggarakan program magang Jepang di setiap provinsi dengan cara penunjukkan ke kantor wilayah Jatim untuk menyelenggarakan seleksi magang ke Jepang namun belum terealisasi, semenjak adanya Otonomi Daerah tahun 2004 hingga sekarang kantor itu berganti nama menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur program magang Jepang terealisasikan. Dalam memajukan perekonomian daerah untuk mengatasi pengangguran mempunyai solusi dengan cara melakukan pemberdayaan sumber daya manusia seperti halnya pembinaan dan pelatihan kerja untuk meningkatkan soft skill serta mensosialisasikan program pemagangan Jepang ke setiap kabupaten/kota di Jawa Timur.

Pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 peserta yang lulus pemagangan Jepang sangat sedikit akibat tidak adanya pembekalan yang diadakan pemerintah, sehingga peserta pemagangan yang dikirim ke Jepang cenderung tidak signifikan. Pada tahun 2016 pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi di setiap kabupaten/ kota untuk menciptakan lembaga pelatihan kerja (LPK) supaya peserta pemagangan mampu mengikuti proses perekrutan dan lolos seleksi pemagangan ke Jepang. Pada tahun 2017 peserta pemagangan di provinsi Jawa Timur dikirim sebanyak 86 orang, tahun 2018 sebanyak 92 orang, tahun 2019 sebanyak 105 orang.

Program pemagangan dibentuk untuk mencapai kualitas ketrampilan sumber daya manusia serta cara efektif dan efisien pemerintah dalam mempersiapkan tenaga kerja untuk dapat berdaya saing dalam dunia usaha, ada 62 bidang yang disediakan pemerintah dalam program pemagangan ke Jepang dengan masa kontrak pemagangan kerja 3 tahun namun pada tahun 2017 perjanjian magang kerja berubah, apabila peserta memiliki soft skill yang sangat bagus dapat memperpanjang masa kontrak pemagangan kerja menjadi 5 tahun. Terdapat fasilitas yang diperoleh peserta pemagangan selama berada di Jepang antara lain gaji 12 juta/bulan (belum termasuk lembur), tempat tinggal/apartemen, tiket pulang-pergi Indonesia ke Jepang, Transportasi. Sedangkan fasilitas yang diperoleh peserta pemagangan ketika mereka pulang ke Indonesia antara lain memperoleh tunjangan modal usaha masa pemagangan kerja 3 tahun sebesar 600.000 Yen (\pm 76 Juta) dan visa magang kerja sedangkan masa pemagangan kerja 5 tahun sebesar 1.020.798 yen (\pm 130 Juta), Uang Nenkin 300.000 Yen (\pm 40 Juta), sertifikat kompetensi kerja (JITCO), memudahkan dalam mencari kerja dengan perusahaan Jepang yang ada di Indonesia.

Mengingat tingkat suatu pengangguran terbuka yang ada di Jawa Timur pada februari tahun 2019 dalam angka 3,83%.⁶ Banyaknya jumlah pengangguran di Jawa Timur ini tidak terlepas dari paradigma berfikir (mindset) masyarakat yang kebanyakan berkeinginan menjadi pegawai kantoran, namun untuk tersedianya

⁵ Lincoln ARSYAD, *No Title*, 1st ed. (yogyakarta: BPFE, 1999), <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=14369>.

⁶ A Keadaan Ketenagakerjaan, "Keadaan Ketenagakerjaan Jawa Timur , Agustus 2019," no. 74 (2019): 1–10.

lapangan kerja di lembaga pemerintahan (sektor formal) sangat minim. Yang seperti ini sangat disayangkan, mengingat potensi generasi muda mengenai keahlian dalam berinovasi dan kreatifitas sangat tinggi harapannya dapat dikembangkan.

Dengan adanya program pemagangan ke Jepang dapat menjadi motivasi bagi para peserta pemagangan untuk menjadikan Negara Jepang sebagai tolak ukur Negara maju yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi, etos kerja yang baik, komitmen, loyalitas, dan sifat pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Sehingga dengan adanya kebiasaan yang baik mampu mengaplikasikannya di Indonesia, serta mampu berdaya saing dengan tenaga kerja asing dengan menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

Harapan pemerintah kepada peserta pemagangan ke Jepang fokus ketika mereka kembali ke Indonesia, ketika mereka mendapatkan pengetahuan, modal, relasi hubungan yang luas, dan keahlian soft skill yang terus meningkat saat pemagangan di Jepang, mampu mengaplikasikannya di Indonesia. Ketika peserta purna magang jepang mendapatkan modal kontrak pemagangan kerja 3 tahun memperoleh tunjangan 76 juta dan visa magang kerja sedangkan kontrak pemagangan kerja 5 tahun atau Tokutoiginoi memperoleh tunjangan 130 juta, mampu memanfaatkan modal secara tepat guna dengan cara membuka lapangan kerja baru baik bidang jasa maupun produksi dengan berwirausaha mandiri.

Ada beberapa penelitian sebelumnya mengenai program magang Jepang yang telah dilakukan seperti, Imron Natsir dalam penelitian yang berjudul “Faktor Kinerja Pelatihan Pekerja Indonesia dan Dampaknya terhadap Daya Saing dan Jiwa Kewirausahaan (Studi Kasus:Program Pelatihan Kerja Pemagangan di Jepang)”.⁷ Dengan menggunakan metode kuantitatif melakukan penelitian pengimplementasian program magang Jepang dalam membentuk jiwa kewirausahaan mengelola membentuk kemampuan sumber daya manusia, rekrutmen pemagangan, seleksi pemagangan, pengupahan, penempatan, budaya kerja, kebijakan pemerintah dalam program pemagangan, kinerja pelatihan terhadap tenaga kerja dan menimbulkan jiwa kewirausahaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hasil dari peserta purna magang Jepang ketika mereka kembali ke Indonesia dapat menghasilkan output dengan cara menciptakan lapangan kerja baru melalui wirausaha mandiri.

Tri Mulyani Wahyu Ningsih dalam penelitian yang berjudul “ Pengaruh Karakter Ganbaru terhadap Etos Kerja pada Eks-Pemagang di Jepang”.⁸ Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melakukan penelitian tentang pembentukan karakter peserta purna pemagang Jepang ketika mereka kembali ke Indonesia, rata-rata membuka lapangan kerja baru melalui enterpreneurship mandiri yang mendapatkan modal usaha dari upah setelah mereka magang. Dalam penelitian ini peserta purna magang Jepang membuka lapangan kerja baru melalui enterpreneurship mandiri dalam bidang jasa pertanian memiliki beberapa kendala yakni kesulitan dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk dijadikan karyawan yang softskill dan hardskillnya rendah, kedisiplinan rendah, tidak inovatif dan kreatif, tempatnya terbatas tetapi peminatnya untuk melamar menjadi karyawan banyak. Peserta purna magang Jepang tetap mencari solusi terhadap kendala supaya

⁷ Imron Natsir and Dosen STIE Kalpataru, “Faktor Kinerja Pelatihan Pekerja Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Daya Saing Dan Jiwa Kewirausahaan (Studi Kasus Program Pelatihan Kerja Pemagangan Di Jepang),” *Jurnal Ekonomi* 16 (2014): 131–165.

⁸ Tri Mulyani Wahyuningsing, “Pengaruh Karakter Ganbaru Terhadap Etos Kerja Pada Eks-Pemagang Di Jepang” (2013): 82–93.

tujuan membuka usaha dalam bidang pertanian tetap berjalan, hal ini dapat disimpulkan bahwa peserta purna magang memiliki semangat yang tinggi dalam membuka usaha serta tidak mudah putus asa.

Setyasih Harini, Damayanti Cristy dalam melakukan penelitian yang berjudul “Kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam Meningkatkan Ketrampilan TKI (Studi Kasus: Pelatihan Bahasa dalam Program Magang di Technopark Ganesha Sukowati Sragen)”⁹ Dengan memakai penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Technopark Ganesha Sukowati Sragen. Technopark ganesha sukowati merupakan lembaga pelatihan bahasa asing yang dibentuk sejak tahun 2013, tujuan lembaga ini dibentuk untuk memudahkan mereka yang ingin mengikuti program pemagangan dengan cara terlebih dahulu mengikuti pelatihan serta menambah soft skill para pemegang. Harapan peserta purna pemegang setelah kembali ke Indonesia dapat memperoleh hasil yang maksimal seperti dalam hal finansial dan kesejahteraan hidup. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan mengikuti pelatihan bahasa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan diri mengikuti program magang jepang dikabupaten sragen sangat diminati masyarakat, hal ini dikarenakan peserta purna magang ketika mereka kembali ke Indonesia mereka mempunyai modal untuk membuat usaha dan memiliki kesejahteraan hidup tinggi yang berasal dari upah pemagangan Jepang.

Solechan dalam penelitian yang berjudul “Rekrutmen Program Pemagangan ke Jepang: Suatu Tinjauan Program Pemerintah Daerah”¹⁰ Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif membahas tentang program magang Jepang sebelum mengikuti perekrutan para peserta biasanya mengikuti lembaga pelatihan kerja (LPK) untuk diberikan arahan pelatihan. Dalam melakukan perekrutan seleksi program magang Jepang terdapat beberapa tahapan seperti seleksi administrasi, dan lolos persyaratan teknis.

Muhammad Husni Thamrin yang berjudul “Kualifikasi, Pelaksanaan dan Profil Bidang Kerja pada Program Pemagangan ke Jepang bagi Lulusan SMK”¹¹ Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif membahas tentang program magang Jepang bagi lulusan smk tergolong banyak diminati, persyaratan seleksi yang harus dipenuhi seperti persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, sebelum pemberangkatan program magang Jepang para peserta diberi pelatihan pembekalan ketrampilan kerja, bidang kerja dalam program pemagangan ke Jepang. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa program magang Jepang sangat diminati dan tergolong tinggi bagi lulusan SMK.

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang dikutip terdapat ragam hasil penelitian tentang minat terhadap pemagangan, persyaratan seleksi hingga output pasca magang Jepang. Sehingga dalam penelitian kali ini akan menyajikan hal yang berbeda berdasarkan tempat penelitian yang dilakukan di Disnaker Jawa Timur, pengambilan sampel peserta purna magang, dan epektifitas kegiatan magang terhadap peserta pasca magang dalam lingkup berwirausaha dan mendapatkan pekerjaan. Ketika peserta purna magang mampu mengaplikasikan dengan membuka

⁹ Setyasih Harini Christy Damayanti, “Kerjasama Indonesia-Jepang Dalam Meningkatkan Keterampilan TKI,” *Eksplorasi* XXVII, no. 2 (2015): 587–593, <http://www.britannica.com>.

¹⁰ Solechan Solechan, “Rekrutmen Program Pemagangan Ke Jepang: Suatu Tinjauan Program Pemerintah Daerah,” *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 3 (2018): 326–344.

¹¹ M H Thamrin, “Kualifikasi, Pelaksanaan Dan Profil Bidang Kerja Pada Program Pemagangan Ke Jepang Bagi Lulusan Smk,” *E-Jurnal Pendidikan Vokasional Teknik Mesin*, 2014, <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/mesin/article/view/3374>.

suatu lapangan kerja baru dengan melalui wirausaha mandiri, harapan pemerintah dari wirausaha mandiri mereka mampu menjadi pelaku produksi dalam pembangunan usaha kecil mikro dan bidang jasa seperti pelatihan kerja supaya tetap tumbuh dan berkembang di wilayahnya. Dengan hal ini otomatis mereka juga membuka lapangan kerja untuk orang lain, ketika mereka berwirausaha mandiri dan memiliki karyawan dapat membantu mengurangi pengangguran, serta menambah pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi, penelitian yang dimaksud menggunakan studi pada tempat yang akan diteliti yakni dengan cara memahami semua aspek penting yang berkaitan tentang penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, dengan menggunakan penelitian ini diharapkan membantu peneliti dalam menjabarkan analisis mengenai gambaran objek dengan jelas dan detail. dilakukan oleh peneliti adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, adapun alasan dilakukan penelitian di lokasi ini karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sebagai fasilitator, pembina pembekalan program magang Jepang, serta tim seleksi program magang Jepang.

Dalam menentukan informan penelitian, dengan cara purposive sampling yakni dengan cara subyektif. Dalam memilih seorang informan, peneliti mempunyai keyakinan bahwa informan yang dipilih memiliki informasi sehingga membantu peneliti dalam mendapatkan informasi untuk dikaji tentang kegiatan magang Jepang berikut dampaknya, yaitu melibatkan penyelenggara dan peserta purna magang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Magang Jepang Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur

Pemagangan adalah suatu sistem pelatihan kerja yang dilaksanakan dan diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah mengenai pelatihan di lembaga pelatihan kerja dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan pembinaan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih memiliki keahlian berpengalaman, dalam melakukan produksi barang atau jasa di suatu perusahaan, dalam rangka menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu.

Program ini merupakan upaya pendampingan dari pemerintah kepada masyarakat secara umum untuk meningkatkan kemampuan soft skill dan relasi, yang kemudian dapat dikembangkan saat sudah kembali ke Indonesia.¹² Pemagangan bertujuan untuk meningkatkan suatu kualitas sumber daya manusia agar menjadi tenaga kerja mampu terampil, kompeten dalam bidangnya, dan produktif dengan meningkatkan suatu peran dalam dunia usaha. Dalam suatu pemagangan, sistem pelatihan kerja dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek di tempat kerja dibandingkan teori sehingga pelatihan mengenai pemagangan menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, yang memastikan pendidikan dan pelatihan selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Pemagangan tidak semata-mata untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, tetapi dapat juga mendorong perusahaan agar meningkatkan produktivitas usahanya. Pemagangan bukan bagian dari proses

¹² Khayatun Nufus, Roji Iskandar, and Ifa Hanifia Senjiati, "Efektifitas Program Pendampingan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha," *Keuangan dan Perbankan Syariah* 2 (2017): 644–652.

rekrutmen pekerja dalam suatu perusahaan, dalam hal ini peserta magang tidak dapat diperlakukan sebagai pekerja.¹³

Pemagangan yang difasilitasi pemerintah secara umum adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta terhadap kemajuan akses ekonomi seperti modal, teknologi dan pasar.¹⁴ Yang secara terperinci dikemas dalam bentuk program pelatihan kerja dan pembinaan untuk meningkatkan ketrampilan individu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan di setiap bidang, serta mampu mempraktekan secara individu seperti halnya etos kerja, kedisiplinan, dan dapat menggunakan teknologi canggih.

Implementasi program magang Jepang di Indonesia dimulai sejak 16 september 1993 Indonesia mulai menjalin kerjasama pemagangan ke Jepang dan melakukan penandatanganan perjanjian antara Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi namun saat ini berubah menjadi Kementerian ketenagakerjaan dengan pemerintah Jepang.

Berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 1999 mengenai tentang hubungan luar negeri dan Undang-undang No 24 Tahun 2000 mengenai tentang perjanjian internasional, provinsi maupun kabupaten atau kota di Indonesia melaksanakan kerjasama luar negeri dengan Jepang melalui Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia di setiap daerah dan membuka lapangan pekerjaan di setiap daerah. Dengan adanya aturan ini kementerian ketenagakerjaan melakukan penunjukkan ke kantor wilayah Jatim pada tahun 2002 untuk merealisasikan program magang Jepang namun tidak terealisasi, semenjak adanya Otonomi Daerah tahun 2004 hingga sekarang kantor itu berganti nama menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur program magang Jepang terealisasikan.

Pemagangan di luar negeri, sebagaimana Permenakertrans No. PER. 08/MEN/V/2008 tentang tata cara perizinan dan penyelenggaraan pemagangan di Jepang, merupakan suatu system pelatihan kerja yang dilaksanakan secara terpadu di Indonesia dan luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja, instansi pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan dibawah pengawasan dan bimbingan instruktur maupun pekerja yang berpengalaman di bidangnya, dalam proses produksi barang atau jasa untuk dapat menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu.

Pada pengimplementasian program magang Jepang diharapkan mampu mengurangi pengangguran di setiap daerah, meningkatkan soft skill tenaga kerja, serta menjadikan Negara Jepang sebagai tolak ukur Negara maju yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi, etos kerja yang baik, komitmen, loyalitas, dan sifat pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Sehingga dengan adanya kebiasaan yang baik purna magang Jepang mampu mengaplikasikannya di Indonesia, serta dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing.

Pelaksanaan program magang Jepang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur berdasarkan Permenakertrans No. PER. 08/MEN/V/2008 tentang tata cara perizinan dan penyelenggaraan pemagangan di luar Negeri,

¹³ Dkk Teguh, Yulianto, "Informasi Dan Profil Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Provinsi Jawa Timur Tahun 2018," *Disnaker Jatim*, last modified 2018, <https://disnakertrans.jatimprov.go.id/>.

¹⁴ Ayi Sobarna, "Konsep Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin Perkotaan," *Mimbar XIX*, no. 3 (2003): 316–329.

merupakan suatu bagian dari system pelatihan kerja yang diselenggarakan secara teratur di Indonesia dan luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja, instansi pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan dibawah pengawasan dan bimbingan instruktur maupun pekerja yang berpengalaman di bidangnya, dalam proses produksi barang atau jasa untuk dapat menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu. Para peserta untuk dapat lolos seleksi dalam mengikuti program magang Jepang harus memenuhi tahapan seleksi seperti persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Implementasi program magang Jepang sudah sesuai dengan yang dijelaskan pada penjabaran tahapan sebelumnya, hal tersebut jika dilihat dari proses tahapan seleksi peserta program magang Jepang. Namun jika dilihat dari segi keberhasilan pemerintah Dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Jawa Timur dalam melakukan promosi di setiap daerah kabupaten atau kota masih kurang. Karena mengalami kendala dalam koordinasi, menurut pemerintah provinsi koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota lebih sulit ketika adanya otonomi daerah dibandingkan dengan sebelum era otonomi daerah, jika setiap daerah menyiapkan peserta pemagangan sehingga memungkinkan banyaknya peserta yang mendaftar dan lolos seleksi program magang Jepang.

Selain itu pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tidak sepenuhnya mendapat dukungan pemerintah kabupaten atau kota tentang adanya program magang Jepang, hal ini karena adanya otonomi daerah sehingga pemerintah kabupaten atau kota lebih memilih mengurus daerahnya dibandingkan ikut campur dengan urusan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tetapi ada juga pemerintah kota atau kabupaten yang mendukung program magang Jepang dengan menganggarkan biaya untuk pelatihan sebelum mengikuti seleksi program magang Jepang bertujuan untuk menambah tenaga kerja di daerahnya dan menambah pendapatan perekonomian daerah. Proses pelaksanaan program magang Jepang sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (RAPBD) yang sudah direncanakan sebelumnya dan dilaksanakan pada Triwulan III.

Berdasarkan hasil perolehan wawancara yang diperoleh peneliti dari bapak samsul selaku panitia seleksi program magang Jepang mempunyai tujuan dari magang Jepang yakni melatih mulai dari etos kerja, teknologi, pemberian modal usaha, serta menciptakan generasi muda yang mampu menciptakan wirausaha mandiri dan dapat merekrut pekerja di daerah masing-masing. Dalam menjalankan program magang Jepang pemerintah memiliki LPK penyangga yang didirikan oleh purna magang Jepang supaya para peserta program magang Jepang dapat lolos persyaratan seleksi, dengan adanya jumlah pengangguran karena tingginya permintaan kompetensi perusahaan sedangkan pencari kerja tidak memenuhi syarat yang diinginkan perusahaan sehingga pemerintah memberikan pelatihan untuk mengurangi pengangguran.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa implementasi program magang Jepang sudah sesuai dengan seperti yang dijelaskan pada Permenakertrans No. PER. 08/MEN/V/2008 dijelaskan bahwasanya mengenai prosedur perizinan dan penyelenggaraan pemagangan ke Luar Negeri, merupakan suatu system pelatihan kerja yang dilaksanakan secara teratur di Indonesia dan luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja, instansi pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan dibawah pengawasan dan bimbingan instruktur maupun pekerja yang

berpengalaman di bidangnya, dalam proses produksi barang atau jasa untuk dapat mendominasi ketrampilan atau keahlian tertentu.

Dalam mengikuti program magang Jepang terdapat proses tahapan seleksi pemerintah melalui Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan pada triwulan ke III, rekrutmen dilakukan satu sampai dua kali setiap tahunnya. Dalam proses pendaftaran mempunyai dua cara yakni dengan cara beregu dan mandiri, pendaftaran beregu yakni peserta yang terdapat beberapa orang sebelumnya peserta telah bergabung dalam lembaga pelatihan kerja (LPK) di kota atau kabupaten masing-masing. Tujuan peserta mengikuti lembaga pelatihan kerja untuk mempersiapkan runtutan seleksi program pemagangan ke Jepang untuk mendapatkan bimbingan pelatihan agar lolos seleksi, sedangkan untuk pendaftaran mandiri yakni murni dari seseorang individu tanpa mengikuti bimbingan pelatihan yang diadakan oleh LPK. Panitia memiliki beberapa persyaratan untuk lolos mengikuti program pemagangan ke Jepang antara lain:

1. Persyaratan Administrasi yakni persyaratan yang wajib dipenuhi berupa berkas-berkas pribadi seperti:

- a) Minimal lulusan SMK/D3/S1
- b) Usia minimal 18 tahun
- c) Fotocopy ijazah
- d) Fotocopy kartu keluarga
- e) Fotocopy kartu tanda penduduk
- f) Pas foto 3x4 dua kali, pas foto 4x6 dua kali

2. Persyaratan Teknis yakni persyaratan yang harus dipenuhi ketika lolos seleksi administrasi seperti:

- a) Lolos tes matematika yakni peserta mampu menyelesaikan soal matematika (20 soal dalam waktu 15 menit, minimal 14 soal dikerjakan secara benar)
- b) Lolos kesemestaan tubuh yakni panitia melakukan pengecekan seluruh tubuh terhadap peserta untuk memastikan tidak ada anggota tubuh yang rusak sedikitpun.
- c) Lolos tes ketahanan fisik yakni peserta seleksi mampu menyelesaikan lari 3 KM dalam batasan waktu (laki-laki 7,5 kali putaran, cardivier 3 kali putaran), push up sebanyak 35 kali, sit up sebanyak 25 kali
- d) Lolos wawancara
- e) Lolos psikotes
- f) Lolos medical check-up
- g) Lolos tes bahasa Jepang

Terdapat 62 bidang yang disediakan pemerintah dalam program pemagangan ke Jepang dengan masa kontrak pemagangan kerja 3 tahun namun pada tahun 2017 perjanjian magang kerja berubah, apabila peserta memiliki soft skill yang sangat bagus dapat memperpanjang masa kontrak pemagangan kerja menjadi 5 tahun. Terdapat fasilitas yang diperoleh peserta pemagangan selama berada di Jepang antara lain gaji pemagangan selama 3 tahun ataupun 5 tahun di Jepang, para peserta pemagangan memperoleh 3 sumber pendapatan utama yakni

1. Gaji yang diperoleh setiap bulan berkisar antara 80.000 yen sampai dengan 120.000 yen perbulan tergantung masa kerja peserta pemagangan dan tempat bekerja pemagangan.

2. Uang lembur biasanya diberlakukan di Jepang pada tahun kedua, upah lembur diberlakukan setiap jam dengan upah 1000 yen. Biasanya waktu lembur 40 jam sampai dengan 60 jam perbulan.

3. Uang modal usaha yang diberikan kepada para peserta magang sebagai bonus telah menyelesaikan masa kontrak sebesar 600.000 Yen (kurang lebih 76 Juta) dan visa magang kerja sedangkan masa pemagangan kerja 5 tahun memperoleh 1.030.000 yen (kurang lebih 130 Juta).

Selain mendapatkan gaji peserta pemagangan juga memperoleh tempat tinggal/apartemen, tiket pulang-pergi Indonesia ke Jepang, Transportasi, sertifikat kompetensi kerja Japan International Training Cooperation Organization (JITCO) memudahkan para pemagang ketika mereka kembali ke Indonesia untuk bekerja dengan perusahaan Jepang yang ada di Indonesia.

Minat masyarakat terhadap Program Magang Jepang

Program pemagangan Jepang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur sudah terjalin selama sejak 2004, minat masyarakat terhadap program magang Jepang yang diselenggarakan pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sangat tinggi, meskipun secara data pendaftar dan yang dinyatakan lolos jumlahnya fluktuatif. Adapun data pendaftar peserta magang Jepang dan data lolos seleksi magang Jepang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.0
Peserta Ikut Seleksi dan Lolos Seleksi Program Magang Jepang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

NO	TAHUN	JUMLAH PESERTA SELEKSI		KETERANGAN
		IKUT TES	LULUS	
1	2004	1,034	52	khusus Jatim
2	2005	768	62	khusus Jatim
3	2006	710	123	khusus Jatim
4	2007	509	33	khusus Jatim
5	2008	390	90	khusus Jatim
6	2009	342	24	khusus Jatim
7	2010	275	79	khusus Jatim
8	2011	179	100	khusus Jatim
9	2012	700	150	khusus Jatim
10	2013	331	58	khusus Jatim
11	2014	189	49	khusus Jatim
12	2015	187	52	khusus Jatim
13	2016	272	47	khusus Jatim
14	2017	945	434	khusus Jatim
15	2018	566	296	khusus Jatim
16	2019	501	151	khusus Jatim
JUMLAH		6.865	1800	

Sumber: Data statistik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tahun 2019

Dari data di atas menjelaskan bahwa minat dan respon masyarakat terhadap program magang Jepang sangat baik namun ketika dalam proses seleksi para peserta magang kurang adanya persiapan, meski sejak tahun 2017 adanya lembaga pelatihan kerja (LPK) penyangga yang berfungsi melatih dan membimbing para peserta setiap harinya yang ingin mengikuti program magang Jepang. Namun meski adanya LPK penyangga tidak sepenuhnya peserta lolos seleksi program magang Jepang, hal ini dikarenakan persyaratan lolos seleksi cukup berat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Arifin selaku panitia seleksi program magang Jepang mempunyai tujuan dari magang Jepang melatih mulai dari etos kerja, teknologi, pemberian modal usaha, serta menciptakan generasi muda yang mampu menciptakan wirausaha mandiri dan dapat merekrut pekerja di daerah masing-masing. Dalam menjalankan program magang Jepang pemerintah memiliki LPK penyangga yang didirikan oleh purna magang Jepang supaya para peserta program magang Jepang dapat lolos persyaratan seleksi, dengan adanya jumlah pengangguran karena tingginya permintaan kompetensi perusahaan sedangkan pencari kerja tidak memenuhi syarat yang diinginkan perusahaan sehingga pemerintah memberikan pelatihan untuk mengurangi pengangguran.

Efektivitas program magang jepang

Efektivitas Merupakan kemampuan dalam menjalankan pekerjaan secara benar serta memiliki kemampuan untuk memilih sasaran secara tepat.¹⁵ Efektivitas dapat diartikan juga sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam melakukan pencapaian suatu tujuan. Apabila organisasi tersebut telah berhasil dalam menggapai tujuannya, dapat dikatakan organisasi tersebut mampu berjalan secara efektif.¹⁶

Ukuran Efektivitas

Dalam melakukan pengukuran suatu efektivitas dilakukan dengan melihat hasil kerja yang telah tercapai dan mengevaluasi hasil kerja dalam suatu organisasi. Efektivitas juga dapat diukur berdasarkan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila organisasi tersebut telah berhasil dalam mencapai suatu tujuannya, maka dapat dikatakan organisasi berjalan secara efektif. Dalam efektivitas tidak menyatakan besaran biaya yang digunakan dalam mencapai tujuan melainkan melihat proses dalam melaksanakan program atau kegiatan tersebut dalam mencapai suatu tujuan yang direncanakan sebelumnya.

Adapun alat ukur dalam efektivitas kinerja, menurut Richard dan M. Steers yang meliputi:

1. Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan manusia yang terbatas sehingga manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Dalam mencapai keberhasilan dalam organisasi dengan melakukan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan. Setiap orang yang masuk dan terlibat dalam organisasi seseorang dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar baik dengan orang yang bekerja maupun pekerjaan yang ada dalam organisasi tersebut.

2. Prestasi Kerja

¹⁵ Bedjo Siswanto, *Manajemen Modern : Konsep Dan Aplikasi*, 1st ed. (Bandung: sinar baru, 1990), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=497402>.

¹⁶ Ihyaul Ulum and Hafies Sofyani, "Buku ASP.Pdf," 2013.

Prestasi kerja merupakan seseorang yang telah mencapai sesuatu atas hasil kerja dalam melakukan tugas yang berdasarkan pada kecakapan, pengalaman, serta kesungguhan dalam bekerja dan memanfaatkan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai agar melakukan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

3. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yakni suatu tingkat kebahagiaan yang dimiliki seseorang sesuai peranan pekerjaannya dalam suatu organisasi.

4. Kualitas

Kualitas dalam bentuk jasa maupun produk yang telah dihasilkan dalam suatu organisasi dapat menentukan suatu efektivitas kinerja.

5. Penilaian oleh pihak luar

Penilaian organisasi diberikan dalam lingkungan organisasi itu sendiri atau pihak yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Kepercayaan, dukungan, kesetiaan diberikan kepada organisasi oleh petugas serta masyarakat umum.¹⁷

Terdapat pendapat lain, menurut Budiani (2007:53) menjelaskan tentang indikator yang dipergunakan untuk mengukur suatu efektivitas adalah sebagai berikut:

- a. Ketepatan sasaran program, yakni ketercapaian program tepat kepada peserta yang telah ditentukan sebelumnya, jika yang telah ditentukan kurang tepat sasaran maka akan menghambat berbagai pelaksanaan yang ada dalam kegiatan tersebut.
- b. Sosialisasi Program yakni kemampuan suatu penyelenggara dalam melaksanakan sosialisasi program kepada masyarakat umum dan sasaran peserta program sehingga informasi tersebar luas mengenai pelaksanaan program tersampaikan. Dengan melakukan sosialisasi dapat memberikan hasil yang maksimal serta mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan, dengan memberikan informasi juga meningkatkan pengetahuan kepada orang yang menerima informasi tersebut.
- c. Tujuan Program yakni kesesuaian keduanya antara hasil dari program dengan tujuan yang telah ditentukan, serta upaya dalam pencapaian suatu tujuan termasuk sebuah proses. Adapun dalam pencapaian tujuan diperlukan tahapan-tahapan yang terdiri beberapa faktor yaitu: sasaran target yang kongkrit serta kurun waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan program.
- d. Pemantauan program yakni kegiatan yang dilakukan pelaksana program setelah pelaksanaan program sebagai upaya bentuk perhatian terhadap peserta program. Kegiatan pemantauan program sendiri berupa pengawasan serta pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan supaya pekerjaan yang telah dilakukan dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan.¹⁸

Pencapaian Peserta Purna Magang Jepang

Program magang di Jepang pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan bidangnya masing-masing. Para purna magang Jepang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri sehingga dapat mengurangi pengangguran di setiap daerah. Dengan hal ini program magang Jepang ini bisa dijadikan alternatif pemerintah sebagai usaha dalam mengurangi pengangguran.

¹⁷ Richard M STEERS and Magdalena Jamin, *Efektivitas Organisasi (Kaidah Tingkah Laku)*, xii. (Jakarta: Erlangga, 1980).

¹⁸ Kartika Febri Yuliani, "EFEKTIVITAS PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS (P2KM) DI KOTA BANDARLAMPUNG" (Universitas Lampung, 2017).

Peserta program magang Jepang ketika melakukan pemagangan memperoleh gaji setiap bulannya yang jumlahnya lumayan besar. Hal ini jika peserta program magang Jepang mampu mengelola keuangannya dengan baik, mereka akan membawa sejumlah uang tabungan dari hasil gajinya selama magang, selain itu mereka juga mendapatkan uang lembur dan uang modal usaha kepada peserta magang Jepang sebagai bonus telah menyelesaikan masa kontrak magang.

Jumlah tabungan yang diperoleh peserta magang Jepang cukup potensial ketika mereka kembali ke Indonesia sehingga dapat dijadikan sebagai modal usaha. Selain itu pengalaman yang diperoleh ketika magang, etos kerja dan budaya yang ada di Jepang diharapkan mampu mendukung mereka dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta peluang mereka dalam membuka usaha dapat dikatakan terbuka lebar.

Menurut sensus penduduk 2000, Lapangan Pekerjaan merupakan suatu kegiatan seseorang dalam melakukan usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi dimana seseorang tersebut bekerja atau pernah bekerja. Sedangkan lapangan usaha merupakan suatu kegiatan yang sedang dilakukan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha di perusahaan, kantor, atau tempat seseorang bekerja.¹⁹

Ada beberapa cara yang dilakukan dalam memulai usaha atau memasuki dunia usaha antara lain:

1. Mendirikan usaha baru yakni mendirikan usaha dengan memerlukan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri sebelum mendirikan usaha. Terdapat pendekatan utama dalam mencari peluang mendirikan usaha baru, yaitu:
 - a. pendekatan berdasarkan pengalaman, dalam menentukan jenis usaha yang akan dirintis memerlukan ketrampilan, kemampuan, dan latar belakang usahanya.
 - b. Pendekatan berdasarkan kebutuhan pasar, dalam hal ini melakukan pengamatan yang terjadi di lingkungan mengenai kebutuhan pasar sehingga dapat dijadikan sebagai peluang usaha.
2. Seseorang yang berencana membuka usaha juga membutuhkan kompetensi antara lain :
 - a. Kemampuan teknik merupakan kemampuan mengenai bagaimana menyajikan serta memproduksi barang dan jasa.
 - b. Kemampuan pemasaran merupakan kemampuan mengenai bagaimana menemukan pelanggan, pasar, dan harga yang tepat untuk suatu produk.
 - c. Kemampuan finansial merupakan kemampuan mengenai cara mendapatkan sumber-sumber dana dan cara menggunakan dananya.
 - d. Kemampuan hubungan merupakan kemampuan mengenai cara mencari relasi, memelihara dan mengembangkan relasi, negoisasi, serta kemampuan dalam berkomunikasi.
3. Ada beberapa hal diperhatikan dalam merintis usaha:
 - a. Jenis dan bidang usaha yang akan dimulai.
 - b. Bentuk usaha apa yang akan digunakan.
 - c. tempat usaha, lokasi yang akan digunakan.
 - d. Organisasi usaha apa yang akan digunakan.
 - e. Jaminan usaha yang diperoleh ketika memilih usaha tersebut.
 - f. Lingkungan usaha disekitar yang akan berpengaruh dengan usahanya.

¹⁹ “KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM ANGKA Bandar Lampung City in Figures” (1871).

Membeli perusahaan orang lain yakni membeli perusahaan orang lain yang telah dirintis dengan tetap menggunakan nama usaha yang sudah ada. Dalam hal ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- a. Resiko yang diterima lebih sedikit.
- b. Dengan usaha yang sudah berjalan memudahkan diri untuk menjalin dengan pelanggan dan pemasok.
- c. Dalam membeli mempunyai peluang harga yang bisa ditawar.

Ada beberapa faktor yang menentukan nilai perusahaan yang akan dibeli, antara lain:

- a. Faktor kuantitatif perlu dilakukan dalam menilai sebuah bisnis usaha yaitu penilaian berdasarkan aktiva, pasar, laba, perputaran uang (arus kas).
- b. Faktor Non kuantitatif yang perlu dilakukan dalam menilai sebuah bisnis usaha yaitu pasar, pengembangan komunitas dimasa yang akan datang, persaingan, kontrak serikat kerja, harga produk, komitmen hukum.
3. Kerjasama manajemen (*Franchising*) merupakan kerjasama dalam perjanjian serta persetujuan untuk menyelenggarakan usaha, biasanya berupa pemilihan lokasi usaha, pembelian peralatan, pola arus kerja, promosi, sumber-sumber permodalan.
4. Memasuki bisnis keluarga merupakan semua bisnis usaha dalam hal mengelola maupun kepemilikan anggota keluarga tersebut yang terlibat.
 - a. keunggulan perusahaan keluarga yakni dengan adanya bisnis keluarga memiliki sikap perhatian tinggi kepada setiap orang dibanding perusahaan lainnya, manajer keluarga lebih memperhatikan jangka panjang, memberikan kualitas dan nilai bagi konsumen.
 - b. Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha antara lain: tidak memiliki kemampuan dalam mengelola usaha, kurangnya pengalaman pemilik usaha, tidak dapat mengendalikan pengeluaran dan penerimaan keuangan, gagal dalam perencanaan sehingga mengalami kesulitan dalam usaha, penentuan lokasi sangat menentukan keberlangsungan usaha, kurangnya pengawasan efektivitas dan efisien terhadap peralatan, kurang bersikap sungguh-sungguh dalam berusaha, berani melakukan perubahan dan membuat peralihan setiap waktu.
 - c. Adapun potensi yang membuat seseorang dalam membuka usaha mundur yakni pendapatan yang tidak menentu, kegagalan investasi sehingga mengakibatkan kerugian, memerlukan waktu yang lama dalam merintis usaha serta perlunya kerja keras, kualitas hidup yang stagnan dalam membuka usaha sehingga menyebabkan seseorang mundur.²⁰

Namun terdapat kendala yang terjadi ketika purna magang Jepang ketika mereka kembali ke Indonesia misalnya mereka merasa mempunyai tabungan banyak atau orang kaya baru sehingga mereka merubah gaya hidup tinggi dan konsumtif berlebihan, rentan penipuan, minimnya pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola keuangan sehingga menyebabkan menghabiskan seluruh tabungan yang dikumpulkan ketika magang di Negara lain hal ini menyebabkan kehidupan mereka tidak lebih baik dari sebelumnya dan tujuan mengikuti magang diluar negeri untuk merubah hidupnya menjadi sia-sia.

Harapan pemerintah setelah mereka kembali ke Indonesia bukan lagi mencari pekerjaan melainkan mengelola modal yang dimiliki dan bisa membuat lapangan

²⁰ Made Dharmawati, "Buku Kewirausahaan.Pdf" (depok: rajawali pers, 2015).

pekerjaan atau lapangan usaha sendiri dengan memanfaatkan keunggulan dan kearifan local di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Drs. Ec. Sumali, MM. selaku kepala seksi pembinaan kelembagaan pelatihan, bidang pelatihan dan produktivitas yakni harapan pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur kepada purna magang Jepang bilamana menciptakan wirausaha mandiri seperti industri rumahan, industri produksi, jasa. Namun ketika mereka kembali ke Indonesia purna magang Jepang tidak berkomunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi, kabupaten atau kota dengan adanya hal tersebut pemerintah tidak bosan memonitoring dan evaluasi serta pemerintah mengalami kesulitan karena tidak ada yang melapor. Dengan adanya data peserta program Jepang pemerintah mengunjunginya tetapi terkadang ada yang balik ke Jepang kembali karena adanya visa tokuteiginou (visa yang memberi kesempatan purna magang Jepang kembali lagi ke Negara Jepang) purna magang Jepang beranggapan dunia industri di Indonesia masih dianggap kurang menunjang, harapan mereka masih tetap ke negara Jepang untuk mencari rezeki sebagai modal usaha untuk wirausaha.

Tabel 1.1

Hasil wawancara purna magang Jepang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sepuluh magang ketika kembali ke Indonesia:

No	Nama	Berangkat	Pulang	Pekerjaan	Karyawan
1	Hari S	2013	2016	1. Jualan telur 2. Usaha ekspedisi 3. Pengajar LPK	2 orang
2	Hadi	2013	2016	Bengkel bubut	-
3	Nur Nagata	2014	2017	Mendirikan LPK di Kediri	2 orang
4	Januar Pane	2014	2017	1. Guru bahasa Jepang 2. Membuka LPK dalam proses perizinan di bekasi dan padangsidimpuan	-
5	Dwi	2013	2016	1. Pengajar di LPK fokus 2. Pemandu turis 3. Penggilingan daging 4. Warung makan	3 orang
6.	Cipto	2015	2018	1. Sopir Travel 2. Peternakan sapi namun gagal 3. Membeli aset	-
7.	Mbah Jefri	2014	2017	1. Memiliki usaha kafe joko tingkir di kampung inggris	9 orang
8.	Suyono	2014	2017	Pimpinan cabang deca reptiles di Blitar	12 orang
9	Amas	2014	2017	PT Indofood devisi marketing	-
10	Rudi	2014	2017	PT Miyazawa Indonesia	-

Sumber: Hasil wawancara purna magang Jepang

Dengan adanya program magang Jepang harapan pemerintah mampu mengatasi pengangguran, meningkatkan kompetensi skill para pemegang meningkatkan keahlian kerja serta menumbuhkan produktivitas, meningkatkan etos kerja, meningkatkan ketrampilan, menambah wawasan ilmu pengetahuan, selain itu sebagai langkah awal dalam membuka lapangan kerja baru melalui wirausaha mandiri.

Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur berharap ketika para purna magang Jepang kembali ke Indonesia dapat menularkan etos kerja serta berkompetensi tinggi saat berada dalam dunia kerja serta memperbaiki daya saing nasional di dunia internasional. Meski para purna magang Jepang sangat diminati oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri maupun luar negeri seketika selesai masa kontrak dari magang Jepang namun pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menyarankan supaya purna magang Jepang mampu membuka wirausaha mandiri sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja.

Peserta program magang Jepang ketika melakukan pemagangan memperoleh gaji setiap bulannya yang jumlahnya lumayan besar. Hal ini jika peserta program magang Jepang mampu mengelola keuangannya dengan baik, mereka akan membawa sejumlah uang tabungan dari hasil gajinya selama magang, selain itu mereka juga mendapatkan uang lembur dan uang modal usaha kepada peserta magang Jepang sebagai bonus telah menyelesaikan masa kontrak magang.

Jumlah tabungan yang diperoleh peserta magang Jepang cukup potensial ketika mereka kembali ke Indonesia sehingga dapat dijadikan sebagai modal usaha. Selain itu pengalaman yang diperoleh ketika magang, etos kerja dan budaya yang ada di Jepang diharapkan mampu mendukung mereka dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta peluang mereka dalam membuka usaha dapat dikatakan terbuka lebar.

Berdasarkan perolehan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ec. Sumali, MM. selaku kepala seksi pembinaan kelembagaan pelatihan, bidang pelatihan dan produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur harapan pemerintah kepada purna magang Jepang bilamana menciptakan wirausaha mandiri seperti industri rumahan, industri produksi, jasa. Namun ketika mereka kembali ke Indonesia purna magang Jepang tidak berkomunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi, kabupaten atau kota dengan adanya hal tersebut pemerintah tidak bosan memonitoring dan evaluasi serta pemerintah mengalami kesulitan karena tidak ada yang melapor. Dengan adanya data peserta program Jepang pemerintah mengunjungi tetapi terkadang ada yang balik ke Jepang kembali karena adanya visa tokutegino (visa yang memberi kesempatan purna magang Jepang kembali lagi ke Negara Jepang) purna magang Jepang beranggapan dunia industri di Indonesia masih dianggap kurang menunjang, harapan mereka masih tetap ke negara Jepang untuk mencari rezeki sebagai modal usaha untuk wirausaha.

Sedangkan berdasarkan perolehan wawancara dari berbagai informan purna magang Jepang antara lain bapak Hadi, bapak Hari Sukardi, bapak Nur Nagata, bapak Januar Pane, bapak Dwi, bapak Cipto, bapak Mbah Jefri, bapak Suyono, bapak Amas, bapak Rudi. Dapat disimpulkan dari 10 informan purna magang Jepang tersebut mengelola upah dari hasil pemagangan ke Jepang dengan membuka usaha mandiri dan memiliki karyawan, baru merintis usaha, membuka jasa lembaga

pelatihan kerja, serta memanfaatkan sertifikat kerja dari program magang Jepang dengan dimanfaatkan untuk mencari pekerjaan di perusahaan Indonesia.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwasanya program magang Jepang snowballing sampling 10 orang dapat dikatakan efektif dalam menciptakan lapangan kerja baru dikarenakan ketepatan sasaran program dan tujuan program, purna magang Jepang dalam menciptakan lapangan kerja baru dengan adanya modal dari upah yang diperoleh ketika mereka kembali ke Indonesia, purna magang Jepang mampu sebagian ada yang menciptakan wirausaha mandiri seperti mendirikan usaha, menciptakan produk, membuka pelayanan jasa serta memiliki karyawan hal ini dapat menambah tenaga kerja di daerahnya serta dapat mengurangi pengangguran. Namun kurangnya pemantauan program yang dilakukan pemerintah ketika mereka kembali ke Indonesia dan tidak ada yang lapor.

Analisis Peranan Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Dalam Program Magang Jepang

Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur memiliki peranan program magang Jepang, jika dilihat dari data peserta lolos seleksi program magang Jepang pemerintah berupaya mengurangi pengangguran di setiap kabupaten atau kota salah satunya melalui program magang Jepang.

Pemerintah memiliki tujuan dari magang Jepang melatih mulai dari etos kerja, teknologi, pemberian modal usaha, serta menciptakan generasi muda yang mampu menciptakan wirausaha mandiri dan dapat merekrut pekerja di daerah masing-masing serta melakukan koordinasi dan sosialisasi program magang Jepang disetiap kabupaten atau kota. Dengan banyaknya jumlah pengangguran karena tingginya permintaan kompetensi perusahaan sedangkan pencari kerja tidak memenuhi syarat yang diinginkan perusahaan sehingga pemerintah memberikan pelatihan untuk mengurangi pengangguran.

Berdasarkan perolehan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ec. Sumali, MM. selaku kepala seksi pembinaan kelembagaan pelatihan, bidang pelatihan dan produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur upaya pemerintah dalam program magang Jepang untuk mengurangi pengangguran di setiap daerah dengan cara melakukan promosi ke setiap daerah kota atau kabupaten, ketika melakukan sosialisasi ke setiap daerah yang ada di Jawa Timur tidak sepenuhnya mendapat dukungan pemerintah kabupaten atau kota tentang adanya program magang Jepang, hal ini karena adanya otonomi daerah sehingga pemerintah kabupaten atau kota lebih memilih mengurus daerahnya dibandingkan ikut campur dengan urusan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tetapi ada juga pemerintah kota atau kabupaten yang mendukung program magang Jepang dengan menganggarkan biaya untuk pelatihan sebelum mengikuti seleksi program magang Jepang bertujuan untuk menambah tenaga kerja di daerahnya dan menambah pendapatan perekonomian daerah. Pemerintah juga melakukan promosi magang Jepang melalui media cetak seperti pamflet, brosur, membuat spanduk sebagai promosi di setiap kabupaten atau kota disebarluaskan diseluruh Jawa Timur, dan media elektronik seperti melalui web Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Televisi pernah tayang di Jtv mengenai program magang Jepang.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai penyelenggara program magang Jepang sangat berperan penting dalam melakukan sosialisasi program, tujuan program, ketepatan sasaran program dalam menyampaikan disetiap daerah, namun juga memiliki

kendala dengan pemerintah daerah kabupaten atau kota dikarenakan susah koordinasi akibat adanya otonomi daerah sehingga pemerintah kabupaten atau kota lebih memilih mengurus daerahnya dibandingkan ikut campur dengan urusan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.

Analisis Efektivitas Program Magang Jepang Dalam Penciptaan Lapangan Kerja Baru

Dengan adanya program magang Jepang harapan pemerintah mampu mengatasi pengangguran, meningkatkan kompetensi skill para pemegang meningkatkan keahlian kerja serta menumbuhkan produktivitas, meningkatkan etos kerja, meningkatkan keterampilan, menambah wawasan ilmu pengetahuan, selain itu sebagai langkah awal dalam membuka lapangan kerja baru melalui wirausaha mandiri.

Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur berharap ketika para purna magang Jepang kembali ke Indonesia dapat menularkan etos kerja serta berkompetensi tinggi saat berada dalam dunia kerja serta memperbaiki daya saing nasional di dunia internasional. Meski para purna magang Jepang sangat diminati oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri maupun luar negeri seketika selesai masa kontrak dari magang Jepang namun pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menyarankan supaya purna magang Jepang mampu membuka wirausaha mandiri sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja.

Peserta program magang Jepang ketika melakukan pemagangan memperoleh gaji setiap bulannya yang jumlahnya lumayan besar. Hal ini jika peserta program magang Jepang mampu mengelola keuangannya dengan baik, mereka akan membawa sejumlah uang tabungan dari hasil gajinya selama magang, selain itu mereka juga mendapatkan uang lembur dan uang modal usaha kepada peserta magang Jepang sebagai bonus telah menyelesaikan masa kontrak magang. Jumlah tabungan yang diperoleh peserta magang Jepang cukup potensial ketika mereka kembali ke Indonesia sehingga dapat dijadikan sebagai modal usaha. Selain itu pengalaman yang diperoleh ketika magang, etos kerja dan budaya yang ada di Jepang diharapkan mampu mendukung mereka dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta peluang mereka dalam membuka usaha dapat dikatakan terbuka lebar.

Berdasarkan perolehan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ec. Sumali, MM. selaku kepala seksi pembinaan kelembagaan pelatihan, bidang pelatihan dan produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur harapan pemerintah kepada purna magang Jepang bilamana menciptakan wirausaha mandiri seperti industri rumahan, industri produksi, jasa. Namun ketika mereka kembali ke Indonesia purna magang Jepang tidak berkomunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi, kabupaten atau kota dengan adanya hal tersebut pemerintah tidak bosan memonitoring dan evaluasi serta pemerintah mengalami kesulitan karena tidak ada yang melapor. Dengan adanya data peserta program Jepang pemerintah mengunjungi tetapi terkadang ada yang balik ke Jepang kembali karena adanya visa tokutegino (visa yang memberi kesempatan purna magang Jepang kembali lagi ke Negara Jepang) purna magang Jepang beranggapan dunia industri di Indonesia masih dianggap kurang menunjang, harapan mereka masih tetap ke negara Jepang untuk mencari rezeki sebagai modal usaha untuk wirausaha.

Sedangkan berdasarkan perolehan wawancara dari berbagai informan purna magang Jepang antara lain bapak Hadi, bapak Hari Sukardi, bapak Nur Nagata,

bapak Januar Pane, bapak Dwi, bapak Cipto, bapak Mbah Jefri, bapak Suyono, bapak Amas, bapak Rudi. Dapat disimpulkan dari 10 informan purna magang Jepang tersebut mengelola upah dari hasil pemagangan ke Jepang dengan membuka usaha mandiri dan memiliki karyawan, baru merintis usaha, membuka jasa lembaga pelatihan kerja, serta memanfaatkan sertifikat kerja dari program magang Jepang dengan dimanfaatkan untuk mencari pekerjaan di perusahaan Indonesia. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwasanya program magang Jepang snowballing sampling 10 orang dapat dikatakan efektif dalam menciptakan lapangan kerja baru dikarenakan ketepatan sasaran program dan tujuan program, purna magang Jepang dalam menciptakan lapangan kerja baru dengan adanya modal dari upah yang diperoleh ketika mereka kembali ke Indonesia, purna magang Jepang mampu sebagian ada yang menciptakan wirausaha mandiri seperti mendirikan usaha, menciptakan produk, membuka pelayanan jasa serta memiliki karyawan hal ini dapat menambah tenaga kerja di daerahnya serta dapat mengurangi pengangguran. Namun kurangnya pemantauan program yang dilakukan pemerintah ketika mereka kembali ke Indonesia dan tidak ada yang lapor.

KESIMPULAN

Simpulan ditulis dalam satu paragraf, yang merupakan ringkasan dari hasil dan pembahasan serta menjawab dari tujuan dari penelitian/publikasi. Menekankan pada kebaruan dari penemuan atau pengembangan. Pada bagian ini dapat memuat saran yang disusun untuk kegiatan praktis ataupun penelitian lanjutan berdasarkan hasil kebaruan yang ditemukan.

Implementasi Program Magang Jepang Yang Dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam melakukan sosialisasi program, tujuan program, ketepatan sasaran program dalam menyampaikan disetiap daerah, sudah sesuai dengan seperti yang dijelaskan pada Permenakertrans No. PER. 08/MEN/V/2008 dijelaskan bahwasanya mengenai prosedur perizinan dan penyelenggaraan pemagangan di Luar Negei, merupakan suatu system pelatihan kerja yang dilaksanakan secara teratur di Indonesia dan luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja, instansi pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan dibawah pengawasan dan bimbingan instruktur maupun pekerja yang berpengalaman di bidangnya, dalam proses produksi barang atau jasa untuk dapat mendominasi ketrampilan atau keahlian tertentu. Namun juga memiliki kendala dengan pemerintah daerah kabupaten atau kota dikarenakan susahnya koordinasi akibat adanya otonomi daerah sehingga pemerintah kabupaten atau kota lebih memilih mengurus daerahnya dibandingkan ikut campur dengan urusan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat tetapi banyak pula pemerintah kabupaten atau kota yang mendukung adanya program magang Jepang.

Efektivitas Program Magang Jepang Dalam Penciptaan Lapangan Kerja Baru Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari wawancara beberapa orang dikatakan efektif dalam menciptakan lapangan kerja baru dikarenakan idak semua purna magang Jepang menciptakan lapangan kerja baru dengan adanya modal dari upah yang diperoleh ketika mereka kembali ke Indonesia, purna magang Jepang mampu sebagian ada yang menciptakan wirausaha mandiri seperti mendirikan usaha, menciptakan produk, membuka pelayanan jasa serta memiliki karyawan sehingga menambah tenaga kerja di daerahnya dan mengurangi pengangguran. Namun terdapat pula purna magang Jepang yang memanfaatkan sertifikat pekerja

magang Jepang untuk melamar pekerjaan di Indonesia, hal tersebut mempunyai nilai tambah pencari pekerja untuk diterima di perusahaan, selain itu kemampuan dalam berbahasa Jepang membuat mereka menjadi tenaga pengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- /BPS-Statistics Indonesia. "Indonesia 2019 Outlook." *Laporan Perekonomian Indonesia* 2019 04, no. 01 (2019): 2019–2020.
- ARSYAD, Lincolin. *No Title*. 1st ed. Yogyakarta: BPFE, 1999.
<https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=14369>.
- Bedjo Siswanto. *Manajemen Modern : Konsep Dan Aplikasi*. 1st ed. Bandung: sinar baru, 1990. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=497402>.
- BPS. "Agustus 2019: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 5,28 Persen." *Badan Pusat Statistik*. Last modified 2019.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2019/11/05/1565/agustus-2019-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-28-persen.html>.
- Dharmawati, Made. "Buku Kewirausahaan.Pdf." Depok: rajawali pers, 2015.
- Harini Christy Damayanti, Setyasih. "Kerjasama Indonesia-Jepang Dalam Meningkatkan Keterampilan TKI." *Eksplorasi XXVII*, no. 2 (2015): 587–593.
<http://www.britannica.com>.
- Kartika Febri Yuliani. "EFEKTIVITAS PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS (P2KM) DI KOTA BANDAR LAMPUNG." Universitas Lampung, 2017.
- Ketenagakerjaan, A Keadaan. "Keadaan Ketenagakerjaan Jawa Timur , Agustus 2019," no. 74 (2019): 1–10.
- Natsir, Imron, and Dosen STIE Kalpataru. "Faktor Kinerja Pelatihan Pekerja Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Daya Saing Dan Jiwa Kewirausahaan (Studi Kasus Program Pelatihan Kerja Pemagangan Di Jepang)." *Jurnal Ekonomi* 16 (2014): 131–165.
- Nufus, Khayatun, Roji Iskandar, and Ifa Hanifia Senjiati. "Efektifitas Program Pendampingan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha." *Keuangan dan Perbankan Syariah* 2 (2017): 644–652.
khayatunnufus12@gmail.com.
- Prasetyo, Hoedi, and Wahyudi Sutopo. "Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset." *J@ti Undip : Jurnal Teknik Industri* 13, no. 1 (2018): 17.
- Sobarna, Ayi. "Konsep Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin Perkotaan." *Mimbar XIX*, no. 3 (2003): 316–329.
- Solechan, Solechan. "Rekrutmen Program Pemagangan Ke Jepang: Suatu Tinjauan Program Pemerintah Daerah." *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 3 (2018): 326–344.
- STEERS, Richard M, and Magdalena Jamin. *Efektivitas Organisasi (Kaidah Tingkah Laku)*. xii. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Teguh, Yulianto, Dkk. "Informasi Dan Profil Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Provinsi Jawa Timur Tahun 2018." *Disnaker Jatim*. Last modified 2018.
<https://disnakertrans.jatimprov.go.id/>.
- Thamrin, M H. "Kualifikasi, Pelaksanaan Dan Profil Bidang Kerja Pada Program Pemagangan Ke Jepang Bagi Lulusan Smk." *E-Jurnal Pendidikan Vokasional Teknik Mesin*, 2014. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/mesin/article/view/3374>.
- Ulum, Ihyaul, and Hafies Sofyani. "Buku ASP.Pdf," 2013.
- Wahyuningsing, Tri Mulyani. "Pengaruh Karakter Ganbaru Terhadap Etos Kerja Pada Eks-Pemagang Di Jepang" (2013): 82–93.
- Yurikosari, Andari. "Review Pemagangan Luar Negeri Dalam Rangka Penempatan (Studi Mengenai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2008)." *Jurnal Hukum PRIORIS* 5, no. 1 (2016): 45–62.
- "KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM ANGKA Bandar Lampung City in Figures" (1871).